

BAB IV

MOTIF DAN MODEL PERPINDAHAN PARTAI POLITIK

A. Motif Perpindahan Partai Politik

1. Konstruksi partai politik

Pada dasarnya partai politik merupakan sarana bagi orang atau kelompok untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Negara. Carl J Freiderich mendefinisikan partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan kekuasaan pada pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan pengawasan ini memberikan kemanfaatan pada anggota partainya yang berupa idial maupun material.¹ Pandangan ini didukung oleh pendapat H. Ismail yang mengatakan:

“partai kalau bagi saya mas, merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang mempunyai perhatian terhadap kehidupan politik, baik tingkat nasional maupun lokal. Masing-masing orang yang ada di partai politik selalu membawa kepentingan dirinya, hal itu bukan berarti lantas mengabaikan kepentingan masyarakat umum. Tetapi setahu saya ya seperti itu, tiap-tiap orang biasanya mempunyai kepentingan pribadi sebagai titik awal untuk mencapai kemaslahatan masyarakat umum.”²

Partai politik yang dianggap sebagai tempat berkumpulnya orang-orang dengan perhatian terhadap kehidupan politik, baik tingkat nasional maupun lokal selalu membawa kepentingan dirinya dan kepentingan

¹ Miriam Budiarmo, *dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1993), 161.

² Wawancara dengan H. Ismail (Rabu, 8 Mei 2013) jam 10.00-13.00.

masyarakat umum. Namun kepentingan individual di partai politik menjadi titik dominan dalam setiap perpolitikan Indonesia. Sekalipun dengan bahasa yang berbeda, secara substansi memiliki keterkaitan dengan di atas, pandangan H. Khusnul yang mengatakan bahwa:

“parpol adalah tempat kelompok orang yang aktif di dalam kegiatan politik. Maksudnya di dalam parpol seseorang bisa memperjuangkan sesuatu yang mungkin berbeda jika tidak lewat dalam partai politik. Karena parpol kan bisa jadi sebagai alat kita untuk mencapai pada posisi dimana kita bisa menyuarakan aspirasi rakyat, seperti lembaga legislatif. Kita bisa menduduki lembaga legislatif tidak ada jalan lain kecuali melalui partai politik”³

Informan kedua yang menganggap partai politik sebagai tempat kelompok orang yang aktif di dalam kegiatan politik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, seperti lembaga legislatif. Memperjuangkan aspirasi rakyat merupakan cita-cita bersama sebagaimana dikatakan oleh H. Usman partai politik adalah wadah untuk orang-orang yang mempunyai cita-cita yang sama, yang kemudian diformulasikan sebagai rencana strategis dari partai politik itu.

“partai politik itu mas, merupakan lembaga politik yang menaungi gagasan-gagasan orang yang ada didalamnya. Gagasan-gagasan ini tentu tidak selalu sama antara orang satu dengan yang lainnya, hal ini merupakan tugas parpol untuk mempersatukan gagasan-gagasan tersebut agar menjadi kesatuan yang bisa diterima oleh banyak orang. Orang-orang yang ada di dalam parpol itu belum tentu mempunyai tujuan yang sama mas, karena mereka pada dasarnya mempunyai syahwat yang berbeda. Katakanlah shahwat politik itu A sampai D, dari A sampai D itu kita tidak bisa memaksa parpol untuk memenuhi hal itu. Sebab parpol sendiri mempunyai aturan yang mengikat bagi seluruh warganya.”⁴

³ Wawancara dengan H. Khusnul (Rabu, 8 Mei 2013) jam 18.00-20.30.

⁴ Wawancara dengan H. Usman (26 Mei 2013) jam 00.00-02.00.

Berangkat dari ilustrasi data diatas, kita dapat mengetahui antara satu dengan lainnya saling terkait. Paling tidak ada tiga benang merah yang dapat kita jadikan sebagai sai pemahaman politik yaitu; *pertama*; partai politik sebagai media untuk aktif dalam konstelasi politik. Kedua; partai politik sebagai instrument perjuangan untuk mencapai kekuasaan di lembaga pemerintah. Ketiga; partai politik sebagai gudang ide yang mampu memperbaharui kehidupan sosial-politik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Partai politik bisa dikatakan sebagai salah satu pilar demokrasi, sehingga kompetensi dan kapabilitas orang yang ada di dalamnya akan sangat menentukan sampai seberapa jauh partai politik mampu mengawal demokratisasi. Didalam mengawal demokratisasi ini, setidaknya partai politik mengemban tujuh tujuan dasar yang dimilikinya seperti yang tertuang dalam UU No 2 tahun 2008⁵.

⁵ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*. Tujuan didirikannya Partai politik adalah; *pertama* mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. *Kedua*, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ketigai*, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun secara khusus partai politik mempunyai tujuan *Pertama*, meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; *kedua*, memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan. Bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Senada dengan itu, H. Ismail memberikan gambaran bahwa dirinya aktif didunia politik mempunyai tujuan yakni;

“Sebenarnya tujuan saya masuk partai politik tidak jauh dari tujuan parpol itu sendiri, tapi selain itu juga ada tujuan yang berangkat dari diri saya sendiri mas. Tujuan saya pribadi masuk ke dalam partai politik tidak lain adalah ingin mensejahterakan rakyat, ingin berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita kalau tidak melewati media ini mau lewat mana lagi mas untuk memberikan koreksi pada jalannya pemerintahan ini.”⁶

Kesejahteraan masyarakat umum merupakan tujuan terbentuknya negara, sekalipun pengertian kesejahteraan masih kontroversial. Oleh karena itu merumuskan kesejahteraan merupakan keharusan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, kesejahteraan adalah proses mutualistik antara negara dan masyarakat, Negara harus menciptakan sistem yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk sejahtera, sedangkan masyarakat memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dengan demikian diharapkan jumlah masyarakat yang sejahtera semakin meningkat baik dari aspek kualitas dan kuantitasnya.

Kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak menjadi satu-satunya tujuan dari para politisi di partai politik. Tujuan yang lain politisi di partai politik adalah mengikuti sabda *masyayikh* yang menjadi patron bagi seluruh kehidupannya. Tujuan ini diamini oleh H. Khusnul yang mengatakan:

“Kalau saya ini seringkali tidak sama dengan yang lain. Karena waktu PKB lahir itu bapak saya (H. Sholeh Qosim), ada di partai politik itu. Meskipun waktu itu saya jadi pengurus di parpol lain

⁶ Wawancara dengan H. Ismail (Rabu, 8 Mei 2013) jam 10.00-13.00.

(partai kedaulatan), sehingga mengharuskan saya berpindah. Sebab itu sebagai wujud rasa taqdim saya ke orang tua. Yang kedua dimata saya melihat memang di PKB waktu itu yang mengelilingi kyai masyaallah banyaknya. Sehingga menjadikan saya tertarik di PKB. Karena prinsip saya mengikuti apa yang dilakukan oleh para ulama, termasuk tujuan dalam terjun ke dunia politik seperti ini.”⁷

Berangkat dari ilustrasi H.Khusnul diatas, dapat dikatakan bahwa dia memilih partai politik sangat bergantung pada orang tua dan mengikuti para kiai. Hubungan ini dapat disebut sebagai hubungan patron-klien.

Istilah Patron secara etimologis berarti seseorang yang memiliki kekuasaan, status, wewenang dan pengaruh. Sedangkan Klien berarti bawahan.⁸ Hubungan patron-klien di Indonesia biasa disebut dengan pola hubungan bapan-anak buah. Dengan pola seperti itu maka posisi patron memiliki tugas untuk menggunakan yang dimilikinya (kekuasaan, wewenang dan pengaruh) kepada klien. Dalam hal ini klien mempunyai tugas untuk merespon tindakan-tindakan dari patron, respon-respon klien ini biasanya dalam bentuk mengajukan penawaran dukungan pada patron.⁹

Pola relasi patron-klien dalam politik seperti yang dilakukan H. Khusnul bukan suatu tujuan yang dilakukan oleh semua politisi. Dalam hal ini H. Usman dalam berpolitik mempunyai tujuan yang mulia, seperti ingin membawa aspirasi rakyat, mengentaskan angka kemiskinan.

“tujuan saya masuk ke partai politik begini mas, yang pertama ya ingin membawa aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat ya seperti

⁷ Wawancara dengan H. Khusnul (Rabu, 8 Mei 2013) jam 18.00-20.30.

⁸ Sunyoto Usman, *Sosiologi; Sejarah, Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Center for Indonesian Research and Development [CIReD]), 2004), 132.

⁹ Karl D. Jackson, *Urbanisasi dan Pertumbuhan Hubungan Patron-Klien; Perubahan Kualitas Komunikasi Interpersonal di Sekitar Bandung dan Desa-Desa di Jawa Barat*, (Jakarta: Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia Jakarta, 1981), 13-14.

tersenggalarnya pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat umum. Kedua ya, ingin memperbaiki perekonomian warga. Hal ini mungkin bisa dilakukan melalui membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya.”¹⁰

Disamping memiliki tujuan untuk masuk ke partai politik, para politisi juga mempunyai alasan-alasan yang dijadikan pijakan untuk memilih partai politik tertentu. PKB sebagai satu-satu partai politik era reformasi yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU) menjadi salah satu alasan kuat politisi PKB. Asumsi ini diperkuat oleh H. Ismail yang mengatakan:

“Saya memilih PKB karena partai ini merupakan partai satu-satunya yang lahirnya dibidani oleh NU. Selain itu, saya sendiri juga warga nahdliyyin sehingga saya juga harus mengikuti organisasi induk saya.”¹¹

Kelahiran PKB memang menjadi fenomena modernisasi politik kaum nahdliyyin era reformasi. Keterbukaan kran kebebasan dalam perpolitikan bangsa ini telah memicu masyarakat untuk memunculkan partai politik yang baru untuk mewadahi aspirasi masyarakat, tidak terkecuali NU sebagai organisasi terbesar di Indonesia juga membidani PKB sebagai wadah aspirasi politik warganya.

Berbeda dengan H. Ismail, H. Khusnul mendasari pilihan politiknya ke PKB dikarenakan jejak politik orang tua yang masuk ke partai politik PKB. Sebagaimana diungkapkan beliau:

¹⁰ Wawancara dengan H. Usman (Minggu, 26 Mei 2013) jam 00.00-02.00.

¹¹ Wawancara dengan H. Ismail (Rabu, 8 Mei 2013) jam 10.00-13.00.

“Saya memilih PKB tidak lain karena mengikuti orang tua, dimana orang tua pada saat itu ada di PKB, sehingga saya juga ikut dimana orang tua tanpa perlu banyak pertimbangan.”¹²

Kharisma orang tuanya bagi H. Khusnul sangat dominan dalam mengatur kehidupan politiknya, seakan-akan mengungkapkan *dimana orang tua berada di partai politik tertentu, maka sayapun juga ikut*. Tanpa pertimbangan terhadap kapabilitas dan seinse politiknya, H. Khusnul memilih partai politik sebagai tunggangan politiknya. Pada taraf ini, kapabilitas dan integritas tidak menjadi pertimbangan pilihan politiknya.

Berbeda dengan H. Usman yang berlatar belakang aktifis dalam berbagai organisasi, sehingga beliau menjadikan pengalaman organisasinya sebagai pijakan dalam memilih partai politik tertentu, sebagaimana diungkapkan H. Usman:

“Saya memilih PKB karena sudah lama berkecimpung didalam NU. Secara otomatis ketika PBNU resmi membuat fatwa bahwa PKB merupakan satu-satunya partai NU, maka saya otomatis harus memilih PKB sebagai kendaraan politik saya.”¹³

Hemat penulis, terdapat dua alasan yang dapat disarikan dari pernyataan H. Usman yaitu pengalaman organisasi di NU menjadi pijakan dalam memilih partai politik sebagai kendaraan politiknya, disisi lain kepatuhan terhadap fatwa PBNU yang menjadikan PKB sebagai satu-satunya partai warga nahdliyyin.

¹² Wawancara dengan H. Khusnul (Rabu, 8 Mei 2013) jam 18.00-20.30.

¹³ Wawancara dengan H. Usman (Minggu, 26 Mei 2013) jam 00.00-02.00.

Berangkat dari ilustrasi diatas, terdapat tiga alasan menjadi partai politik sebagai kendaraan politiknya yaitu; *pertama*; fatwa PBNU yang menjadikan PKB sebagai satu-satunya partai politik yang dilahirkan dari rahim Nu dan sebagai wadah aspirasi masyarakat Nahdliyyin, *kedua*; kharisma orang tua yang “memasung” independensi pilihan politik, karena mengikuti jejak kiprah politik orang tua adalah bagian dari sikap taqdim yang ada dalam dirinya, *Ketiga*; pengalaman organisasi atau berlatar belakang aktifis yang juga dekat dengan dunia persilatan politik telah mendorong untuk melanjutkan langkahnya dalam dunia politik praktis sebenarnya yaitu dengan jalan memasuki partai politik.

2. Motif Masuk Partai Politik

a. Patron-klien

Teori patron klien merupakan teori yang jamak digunakan untuk memahami realitas sosial maupun politik di masyarakat. Teori ini hadir untuk menjelaskan bahwa di dalam sebuah interaksi sosial, masing-masing aktor melakukan hubungan timbal balik. Hubungan ini dilakukan baik secara vertikal (satu aktor kedudukannya lebih tinggi) maupun secara horizontal (masing-masing aktor kedudukannya sama).

Patron klien sendiri merupakan interaksi sosial yang berasal dari hubungan vertikal. Satu aktor memiliki peran yang lebih superior dibandingkan aktor yang lain. Aktor yang superior ini kemudian memberikan bantuan yang diperlukan kepada aktor yang lebih inferior,

sehingga secara norma aktor inferior tersebut merasa harus membalas kebaikan aktor yang kedudukannya lebih tinggi tersebut. Oleh karena itu relasi patron klien sering juga disebut pertukaran antara aktor superior dengan aktor inferior.

Pelras menguraikan arti dari hubungan patron dan klien. Menurutnya, “patron” berasal dari kata “patronus” yang berarti “bangsawan”, sementara “klien” berasal dari kata “klien” yang berarti pengikut. Jika ditambahkan dengan kata “hubungan” maka hubungan patron klien dapat diartikan sebagai hubungan yang tidak setara yang berlangsung antara seorang bangsawan dengan sejumlah pengikut jelata berdasarkan pertukaran barang dan jasa yang didalamnya ketergantungan klien terhadap patron dibalas dengan dukungan perlindungan patron terhadap klien.

Senada dengan hal tersebut, Burke mendefinisikan patronase sebagai sistem politik yang berlandaskan pada hubungan pribadi antara pihak-pihak yang tidak setara. antara pimpinan (patron) dan pengikutnya (klien). Masing-masing pihak mempunyai sesuatu untuk ditawarkan. Klient menawarkan dukungan politik dan penghormatan kepada patron yang ditampilkan dalam berbagai bentuk simbolis (sikap kepatuhan, bahasa yang hormat, hadiah dan lain-lain). Di sisi lain, patron menawarkan kebaikan, pekerjaan, dan perlindungan kepada klientnya.

Diantara para ilmuwan yang fokus pada kajian mengenai relasi patron dan klien, kita perlu merujuk pada James Scott karena

memberikan pemahaman paling detail mengenai hal ini. Scott memberikan definisi bahwa ikatan patron klien didasarkan dan berfokus pada pertukaran yang tidak setara yang berlangsung antara kedua belah pihak, serta tidak didasarkan pada kriteria asumsi. Oleh karena itu siapa saja yang memiliki modal maka ia dapat berstatus sebagai patron. Hal ini berbeda dengan definisi menurut Pelras yang mendasarkan bahwa patron adalah para bangsawan, sementara Scott tidak mempermasalahkan asal-usul golongan tersebut, asal memiliki modal aktor tersebut melakukan pertukaran secara vertikal maka dia layak disebut patron.

Patron klien juga berbeda dengan hubungan kekerabatan. Menurut Wolf dalam hubungan kekerabatan terkandung rasa saling percaya untuk mencapai tujuan, sementara hubungan patron klien terjadi karena pihak-pihak yang ada saling berkepentingan. Di dalam hubungan kekerabatan, kegiatan satu aktor menolong aktor yang lain merupakan kegiatan yang lumrah terjadi dan tidak perlu dibalas. Sedangkan dalam hubungan patron klien, setiap bantuan yang diberikan oleh salah satu aktor (patron) harus dibalas oleh aktor yang lain (klien).

Berangkat dari teori patron klien di atas, penelitian ini menemukan bahwa patron klien dalam perpindahan para politisi dari partai politik satu ke partai politik lainnya termanifestasikan dalam sikap taqdim kepada para ulama ataupun orang tua.

H. Khusnul mengatakan bahwa gabungannya ke partai politik bukan semata-mata karena keinginan pribadi melainkan ditopang oleh

keinginan orang tua yang mengarahkannya. Pada taraf ini, H. Khusnul seakan-akan tidak memiliki pendirian dalam perpolitikannya, namun asumsi itu dibantah oleh dia, karena baginya kepatuhan kepada orang tua merupakan sikap taqdim seorang anak kepada orang tua, sebagaimana diungkapkan:

“Taqdim bagi saya adalah keharusan, seperti apa yang saya lakukan saat ini mas. Saya sekarang di partai PKNU bukan karena pilihan diri saya sendiri, tapi saya masuk PKNU karena melihat bapak saya yang kebetulan saat ini gabung dengan PKNU. Oleh karena itu saya ya harus ikut pilih politik bapak saya”¹⁴

Baginya taqdim merupakan kenicayaan yang harus dipatuhi bagi setiap anak yang masih memiliki orang tua, karena ridha Allah berkelindan dengan ridha orang tua, termasuk dalam kran politik. Pilihan gabung di partai politik PKNU merupakan amanah orang tua sebagai sikap taqdim, bukan karena alasan pribadi, sekalipun demikian, penulis beranggapan bahwa sikap penerimaan kepada amanah orang tua dalam pilihan politiknya juga ditopang oleh kesadaran pribadi yang ada dalam dirinya, sekalipun alasan pertama lebih dominan dari alasan pribadinya. Figur seorang bapak adalah salah satu penentu baginya, dan secara kebetulan bapaknya bergabung dengan PKNU sehingga dirinya juga memantapkan pilihan politiknya ke PKNU.

¹⁴ Wawancara dengan H. Khusnul (Rabu, 8 Mei 2013) jam 18.00.-20.30.

b. Rasional

Pilihan untuk aktif dalam partai politik setiap politisi memiliki dasar yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Dasar-dasar ini tentunya berangkat dari dalam diri masing-masing orang itu yang memiliki kepedulian baik dengan lingkungannya sekitar maupun kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Seperti yang diutarakan oleh H. Ismail dibawah ini:

“saya mas, ketika mulai aktif dalam parpol itu karena adanya semangat. Didalam diri saya semangat ini seperti ada panggilan yang mengharuskan untuk ikut terjun ke dalam politik. Sehingga saya berusaha untuk mewujudkan semangat itu ke dalam politik praktis, siapa tahu kalau saya di dalam parpol bisa membantu banyak orang.¹⁵

Keaktifan dalam partai politik dilandasi oleh semangat yang berkobar dalam diri kita pribadi, semangat ini merupakan titik pijak keterpanggilan nurani untuk aktif dalam mewujudkan kesejahteraan bagi orang banyak. Partai politik dapat menjadi satu wadah yang dapat mewujudkan untuk membantu orang.

Di lain pihak, H. Usman memberikan pandangan berbeda dengan H. Ismail, pandangan H. Usman terkait pilihannya untuk aktif di partai politik didasarkan pada pengalaman organisasi sebagai dasar pilihan politiknya. Kebiasaan berorganisasi berkelindan dengan persoalan yang ada di partai politik sehingga melanjutkan pengalaman organisasi di

¹⁵ Wawancara dengan H. Ismail (Rabu, 22 Mei 2013) jam 15.30-17.00.

panggung politik menjadi keharusan dalam menunjukkan eksistensi diri sebagai politisi, sebagaimana diutarakan:

“Bagi saya dunia politik itu kan sesuatu yang penuh dengan ketidakjelasan. Artinya apa yang sudah kita rencanakan dengan matang belum tentu bisa terwujud, Karena menyangkut banyak orang di dalam partai itu mas. Dan kelebihan ketika saya ada di dalam partai politik pikiran-pikiran kita selalu dikondisikan untuk selalu cerdas didalam menangkap realitas sosial-politik. Sederhananya ya kita selalu mengatur strategi gitu mas.”¹⁶

Anggapan partai politik yang penuh dengan ketidakjelasan atau abu-abu membutuhkan pikiran-pikiran cerdas dan penuh pengalaman sehingga orang yang aktif dalam organisasi sudah selayaknya melanjutkan karir politiknya di partai politik. Hal dilakukan untuk menjaga perilaku politik ideal.

Benang merah yang dapat diambil dari paparan diatas adalah perbedaan dasar atau alasan bergabung dalam partai politik. Perbedaan dasar atau alasan mengindikasikan perbedaan pandangan dan perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan individu yang beragam ini menciptakan dinamika perpolitikan yang dinamis. Satu sisi, dinamika politik mengarah pada konflik secara terbuka, disisi lain dapat memunculkan harmoni politik yang dapat memberi pelajaran bagi masyarakat luas.

Harmonisasi dan terjadinya konflik di dalam partai politik bergantung pada motif yang dimiliki kaum politisi. Para politisi memiliki motif yang dijadikan dasar bagi dirinya untuk bergabung dengan partai

¹⁶ Wawancara dengan H. Usman (Minggu, 26 Mei 2013) jam 00.00-02.00.

politik, juga memiliki tujuan yang hendak diperjuangkan melalui partai politik. Perjuangan-perjuangan inilah yang hendak menafsirkan mimpi besar mereka yang hanya dimungkinkan bisa dicapai melalui partai politik. Perjuangan politisi yang hendak masuk partai politik salahsatunya adalah ingin menjadi penyambung lidah rakyat. Sebagaimana yang disampaikan oleh H. Ismail;

“Rakyat itu kan butuh orang yang bisa menyalurkan keinginannya. Lha keinginan-keinginan ini mas tentu berkaitan dengan kehidupan mereka. Seperti misalnya mahalnya harga sembako. Sedehannya begini mas, rakyat itu menginginkan adanya penyambung lidah rakyat, bagi saya hal inilah yang saya perjuangkan didalam partai politik”.¹⁷

Di era demokrasi, rakyat ditempatkan pada posisi “raja tanpa perintah”, melainkan membutuhkan perwakilan rakyat dalam menyuarakan aspirasinya, menyuarakan mahalnya harga sembako dan lain sebagainya. Instrument yang digunakan dalam menyampaikan aspirai rakyat adalah lembaga legislatif sebagai representasi wakil rakyat. Untuk menjadi wakil rakyat, maka setiap orang harus masuk dalam partai politik.

Penyambung lidah rakyat melalui partai politik bukan satu-satunya perjuangan yang hendak dicapai ketika memilih gabung dengan partai politik. Politisi gabung dengan partai politik, Selain memperjuangkan aspirasi rakyat juga terdapat perjuangan lainnya yakni memperjuangkan agama dengan cara yang berbeda sebagaimana disebutkan oleh H. Khusnul;

¹⁷ Wawancara dengan H. Ismail (Rabu, 8 Mei 2013) jam 10.00-13.00.

“Memperjuangkan agama di dalam parpol, ya seperti penafsiran masing-masing orang yang ada disitu mas. Misalnya ketika saat ini saya di Gerindra. Di dalam Gerindra ini kan banyak orang-orang Islamnya, tetapi bukan Islam yang bermadhab Sunni. Sehingga mungkin saya meng-NU-kan orang-orang itu, agar berhaluan *ahlussunah wal jama'ah*”.¹⁸

Berbeda dengan H. Khusnul, H. Usman mengatakan bahwa bergabungnya di partai politik bertujuan untuk merubah kehidupan masyarakat umum baik dari sisi ekonomi, sosial, dan pendidikan dalam konteks daerah Sidoarjo.

“Saya melihat di Kabupaten Sidoarjo ini butuh perhatian yang lebih agar bisa meningkatkan taraf hidup warganya dan pendapatan daerah. Apabila hal ini bisa dicapai secara tidak langsung yang lain kan ikut terangkat juga mas. Karena pada prinsipnya daerah mempunyai wewenang untuk mengelola rumah tangganya sendiri, sehingga bisa memprioritaskan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten”.¹⁹

Kabupaten Sidoarjo membutuhkan perhatian yang lebih agar bisa meningkatkan taraf hidup warganya melalui pendapatan daerah. Melalui wewenang untuk mengelola rumah tangganya sendiri, sehingga bisa memprioritaskan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten.

Mewujudkan harapan-harapan yang diilustrasikan diatas bahwa partai politik sebagai instrument penyambung lidah rakyat, menyebarluaskan agama dan mensejahterakan masyarakat tidak mudah membalik telapak tangan, terkadang berhasil dengan gagasan politik idealnya, tapi tidak sedikit yang gagal dalam memperjuangkan kerangka

¹⁸ Wawancara dengan H. Khusnul (Jum'at, 24 Mei 2013) jam 20.00-21.30.

¹⁹ Wawancara dengan H. Usman (Minggu, 26 Mei 2013) jam 00.00-02.00.

dasar ideal yang ada dalam dirinya ketika bergabung di partai politik. Keberhasilan mencapai perjuangannya selaras dengan keinginan awal, namun ketika kegagalan yang diperoleh dalam perjuangannya, maka konsekuensi yang harus diterima adalah komitmen pribadi.

Dengan dibarengi oleh cita-cita mulia yang diimplementasikan melalui partai politik, para politisi dalam konteks penelitian ini memiliki sikap yang tegas apabila cita-cita mereka tidak bisa ditempuh oleh partai yang menjadi saluran untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh H. Ismail:

“Sikap yang akan saya ambil adalah akan keluar dari partai yang menjadi jalan untuk mencapai cita tersebut dan mencari partai baru yang sekiranya bisa mewujudkan cita-cita mereka”.²⁰

Ketika perjuangan yang diharapkan tidak tercapai, maka keluar dari partai yang menjadi jalan untuk mencapai cita tersebut dan mencari partai baru yang sekiranya bisa mewujudkan cita-cita merupakan sikap ksatria yang jarang dimiliki oleh orang lain. Pada taraf ini, sikap tegas yang dipertontonkan H. Ismail adalah manifestasi gagasan ideal yang menjadi prinsip dalam dirinya berpolitik.

Senada dengan H. Ismail, H. Khusnul mengungkapkan yang sama yaitu:

“jika partai yang menjadi jalan untuk mencapai cita-cita sebagaimana yang telah diperjuangkan tidak mampu

²⁰ Wawancara dengan H. Ismail (Rabu, 8 Mei 2013) jam 10.00-13.00.

menampung perjuangan, maka saya mengambil sikap memilih keluar dari parpol tersebut dan mencari partai”.²¹

Pernyataan dua informan diatas ditopang oleh sikap tegas yang dimiliki H. Usman yaitu:

“Ketika partai tersebut tidak bisa dijadikan jalan untuk mewujudkan cita-citanya, maka saya akan keluar dari partai tersebut dan mencari jalan baru yakni partai yang bisa mewadahi cita-cita tersebut”.²²

Benang merah yang dapat diambil dari ilustrasi diatas adalah sikap tegas untuk keluar dari partai yang menaunginya apabila tidak dapat menampung mewujudkan perjuangannya. Tiga benang merah itu di dapat dari tiga informan yaitu H. ismail, H. Khusnul dan H. Usman. *Pertama*, menurut H. Ismail ia akan keluar dari partai yang menjadi jalan untuk mencapai cita tersebut dan mencari partai baru yang sekiranya bisa mewujudkan cita-cita mereka.

Kedua, H. Khusnul menyatakan bahwa jika partai yang menjadi jalan untuk mencapai cita-cita sebagaimana yang telah ia perjuangkan, ia juga mengambil sikap memilih keluar dari partai politik tersebut dan mencari partai. *Ketiga*, H. Usman juga memiliki sikap yang sama dengan dua politisi di atas. Ketika partai tersebut tidak bisa dijadikan jalan untuk mewujudkan cita-citanya, maka ia akan keluar dari partai tersebut dan mencari jalan baru yakni partai yang bisa mewadahi cita-cita tersebut.

²¹ Wawancara dengan H. Khusnul (Rabu, 8 Mei 2013) jam 18.00.-20.30.

²² Wawancara dengan H. Usman (Minggu, 26 Mei 2013) jam 00.00-02.00.

3. Idealitas Dan Relitas Partai Politik

Berangkat dari berbagai data yang diperoleh dalam penelitian lapangan, Partai politik dijadikan sebagai sarana perjuangan yang memiliki berbagai fungsi yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik dan sarana pengatur konflik.

Partai politik sebagai sarana komunikasi politik adalah menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat berkurang.²³ Aturan ideal partai politik sebagai sarana komunikasi dalam tingkat struktural dan kultural tidak berjalan dengan baik. Realitas ini sebagaimana diungkap oleh H. Ismail:

“Di PKB saya sudah memenangkan Musyawarah Anak Cabang (MUSANCAB) dan SK-nya sudah keluar, tetapi dengan mudahnya pengurus wilayah memblokir SK-nya. Padahal saya dalam musancab sudah jelas-jelas menang dengan 12 suara, sedangkan lawan saya hanya dapat 3 suara. Pada akhirnya SK itu diberikan pada lawan saya yang hanya mendapatkan 3 suara itu”. Dengan masuk partai Golkar, saya dapat membantu memasukkan teman-teman warga Nahdiyyin menjadi legislatif melalui partai Golkar”.²⁴

Kekecewaan H. Ismail berawal dari perhelatan Musyawarah Anak Cabang (MUSANCAB) PAC PKB Kecamatan Porong yang mengalahkan dirinya. Kekalahan yang dipermasalahkan oleh H. Ismail bukan karena kekalahan yang wajar, akan tetapi posisi H. Ismail yang seharusnya menang dikalahkan. Dalam proses pemungutan suara H. Ismail mendapatkan 12 suara, sedangkan dua kandidat calon yang lain hanya mendapatkan tiga

²³ Ibid., 163.

²⁴ Wawancara dengan H. Ismail (Rabu, 22 Mei 2013) jam 15.30-17.00.

suara. Pada taraf ini maka Pengurus Dewan pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Sidoarjo, mengeluarkan SK (Surat Keputusan) sebagai bukti bahwa H. Ismail telah sah sebagai calon yang berhak menduduki posisi ketua PAC. Namun alangkah tragisnya, SK yang dikeluarkan oleh Cabang Sidoarjo serta merta digagalkan oleh keputusan Wilayah, padahal itu bertentangan dengan hasil Musyawarah Anak Cabang dengan kemenangan dirinya dengan mendapatkan 12 suara berbanding 3 suara.

Kekecewaan terhadap partai politik lama menyebabkan terjadinya perpindahan partai politik dari PKB ke Golkar dan juga dapat dianggap sebagai partai yang dapat menjadi wadah bagi warga nahdliyin untuk menjadi jalan menuju legislatif.

Selain sebagai sarana komunikasi, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik dalam usaha menguasai pemerintahan melalui kemengangan dalam pemilihan umum. Maka dari itu partai politik harus memperoleh dukungan seluas-luasnya.²⁵ Pijakan konseptual ini berbanding terbalik dengan realitas perpindahan para politisi ke partai lain dikarenakan ketidakpahaman dan tidak adanya sosialisasi partai sehingga para pengikut partai politik bukan bertambah, justru berkurang dengan adanya perpindahan partai politik tersebut.

Sedangkan partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, artinya partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat

²⁵ Ibid., 164.

untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Untuk mencapai tujuan itu partai politik biasanya menggunakan cara kontak pribadi, persuasi dan lain-lain.²⁶ Disisi lain, partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Dalam praktek politik sering dilihat bahwa fungsi partai sebagai pengatur konflik dalam melakukannya kurang maksimal. Misalnya informasi yang disampaikan menimbulkan kegelisahan dan perpecahan, yang dikejar bukan kepentingan bersama, tetapi partai cenderung lebih mengejar kepentingan pribadi. Sebagai akibatnya terjadilah pengotakan politik atau konflik tidak terselesaikan, tapi malah dipertajam.²⁷

Perpindahan para politisi ke partai politik lain justru mempertegas bahwa partai politik bukan sarana pengatur konflik dan bahkan menjadi medan perebutan kuasa yang menimbulkan berbagai konflik. hal inilah yang terjadi pada para politisi kutu loncat.

B. Model Perpindahan Partai Politik

1. Makna Ideologis Perpindahan Partai Politik

Fenomena perpindahan partai politik seakan sudah menjadi *trend* dikalangan politisi, hal ini sesuai dengan adagium “rumput tetangga lebih hijau”. Politisi yang terperangah dengan keanggunan partai politik tetangga menciptakan suasana “bajing loncat”. Perpindahan partai politik di kalangan politisi menjadi fenomena yang mudah kita jumpai. Diantara berbagai cara yang dilakukan oleh politisi untuk berpindah partai politik

²⁶ Ibid.,

²⁷ Ibid.,

yakni ada tergiur oleh partai politik yang lain dan ada yang menyebutkan bahwa dirinya pindah partai politik karena diminta oleh pengurus partai politik, sebagaimana diungkapkan H. Ismail:

“saya gabung ke golkar karena saya diminta oleh pengurus Golkar, saya diminta untuk membantu membesarkan Golkar di Kabupaten Sidoarjo. Perolehan kursi legislatif di DPRD Kabupaten Sidoarjo hanya 4 kursi saja dari beberapa kali pemilu, inilah yang harus saya kerjakan untuk mencapai kembali kejayaan Golkar seperti dulu”.²⁸

Perpindahan H. Ismail dari partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ke partai Golkar (Golongan Karya) merupakan pinangan dari pengurus golkar. Pengurus Golkar menganggap dia sebagai orang berpengaruh sehingga pengurus Golkar dengan besar hati meminta H. Ismail untuk membantu membesarkan partai Golkar di Sidoarjo. Gayung bersambut, permintaan pengurus golkar diterima dengan kata sepakat untuk bersama-sama membesarkan partai Golkar di Sidoarjo yang selama beberapa kali pemilu ini hanya memperoleh empat kursi.

Tidak hanya H. Ismail, H. Usman juga dipinang oleh pengurus partai Golkar, sebagaimana diungkapkan H. Usman:

“Saya diminta oleh pengurus Golkar untuk membantu membesarkan partai golkar yang selama ini kurang maksimal didalam perolehan suaranya dalam pemilu.”²⁹

Bergabungnya H. Usman ke partai Golkar dari partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) juga hasil pinangan pengurus partai Golkar di wilayah kabupaten sidoarjo.

²⁸ Wawancara dengan H. Ismail (Rabu, 8 Mei 2013) jam 10.00-13.00.

²⁹ Wawancara dengan H. Usman (Minggu, 26 Mei 2013) jam 00.00-02.00.

Berbeda dengan motif diatas, sekalipun dari akar partai yang sama yaitu PKB, H. Khusnul bergabung dengan PKNU bukan karena pinangan pengurus PKNU melainkan karena mengikuti jejak politik orang tuanya yang pindah ke partai politik PKNU, sebagaimana pengakuan beliau:

“Saya pindah dari partai politik PKB (Partai Kebangkitan bangsa) ke partai politik PKNU karena mengikuti langkah politik bapak, sehingga saya mendaftarkan diri menjadi anggota partai politik PKNU.”³⁰

Perpindahan politisi ke partai politik lain bukan tanpa sebab atau motif yang mendasari perpindahannya. Motif politisi pindah ke partai politik lain, diantaranya karena kekecewaan terhadap partai politik yang dinaunginya, sebagaimana ungkapan H. Ismail:

“Di PKB saya sudah memenangkan Musyawarah Anak Cabang (MUSANCAB) dan SK-nya sudah keluar, tetapi dengan mudahnya pengurus wilayah memblokir SK-nya. Padahal saya dalam musancab sudah jelas-jelas menang dengan 12 suara, sedangkan lawan saya hanya dapat 3 suara. Pada akhirnya SK itu diberikan pada lawan saya yang hanya mendapatkan 3 suara itu”. Dengan masuk partai Golkar, saya dapat membantu memasukkan teman-teman warga Nahdiyyin menjadi legislatif melalui partai Golkar”.³¹

Kekecewaan H. Ismail berawal dari perhelatan Musyawarah Anak Cabang (MUSANCAB) PAC PKB Kecamatan Porong yang mengalahkan dirinya. Kekalahan yang dipermasalahkan oleh H. Ismail bukan karena kekalahan yang wajar, akan tetapi posisi H. Ismail yang seharusnya menang dikalahkan. Dalam proses pemungutan suara H. Ismail mendapatkan 12 suara, sedangkan dua kandidat calon yang lain hanya mendapatkan tiga

³⁰ Wawancara dengan H. Khusnul (Jum'at, 24 Mei 2013) jam 20.00-21.30.

³¹ Wawancara dengan H. Ismail (Rabu, 22 Mei 2013) jam 15.30-17.00.

suara. Pada taraf ini maka Pengurus Dewan pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Sidoarjo, mengeluarkan SK (Surat Keputusan) sebagai bukti bahwa H. Khusnul telah sah sebagai calon yang berhak menduduki posisi ketua PAC. Namun alangkah tragisnya, SK yang dikeluarkan oleh Cabang Sidoarjo serta merta digagalkan oleh keputusan Wilayah, padahal itu bertentangan dengan hasil Musyawarah Anak Cabang dengan kemenangan dirinya dengan mendapatkan 12 suara berbanding 3 suara.

Kekecewaan terhadap partai politik lama menyebabkan terjadinya perpindahan partai politik dari PKB ke Golkar dan juga dapat dianggap sebagai partai yang dapat menjadi wadah bagi warga nahdliyin untuk menjadi jalan menuju legislatif.

Berbeda dengan H. Ismail, H. Khusnul pindah dari partai politik PKB ke partai politik PKNU dikarenakan jejak politik orang tua. Sebagaimana diungkapkan H. Khusnul;

“saya ini mas pindah parpol mungkin berbeda dengan politisi pada umumnya, karena saya dalam berpolitik selalu mengikuti apa yang dilakukan bapak saya. Dan saya selalu melihat parpol yang banyak terdapat ulama’-nya”.³²

Perpindahan politik H. Khusnul memang terbilang unik, berbeda dengan para politisi lainnya, dia mengikuti jejak politik orang tuanya yang pindah ke partai PKNU. Disisi lain, dia beranggapan bahwa dia selalu melihat partai politik yang memiliki banyak ulama, dan dia melihat partai politik PKNU adalah tempat berkumpulnya para ulama.

³² Wawancara dengan H. Khusnul (Jum’at, 24 Mei 2013) jam 20.00-21.30.

Berbeda dengan keduanya, H. Usman mengungkapkan bahwa perpindahan dirinya ke partai politik lainnya dikarenakan tidak lagi difungsikan, sehingga memantapkan dirinya untuk pindah ke partai politik lain sebagai jalan eksistensi dirinya dalam dunia politik, sebagaimana ungkapnya:

“saya pindah ke Golkar ini karena saya di PKB saya sudah tidak menjabat lagi, padahal saya itu awalnya ketua DPC PKB Sidoarjo. Setelah saya pikir-pikir saya akhirnya memilih Golkar”.³³

Berangkat dari ilustrasi diatas, benang merah yang dapat disimpulkan adalah bahwa motif perpindahan politisi ke partai politik lainnya terdapat tiga motif yaitu, kekecewaan, mengikuti partai politik yang banyak ulamannya, dan tidak lagi difungsikan di partai yang lama.

Selain tiga motif diatas, motif perpindahan partai politik juga didukung dengan pemberian kesepakatan antara partai politik dengan masing-masing orang yang gabung dengan partai politik tersebut. Tawar menawar yang dilakukan antara politisi dengan partai politik ini diamini oleh H. Ismail, selain diminta oleh Pengurus Golkar DPD Kabupaten Sidoarjo untuk membantu membesarkan Golkar. Sebagai anggota baru yang masuk dalam salah satu partai politik terlebih dahulu mengikuti ritme administrasi dengan mengajukan permohonan pada partai agar diberi jatah kursi untuk pencalegkan sebanyak sepuluh kursi. Akan tetapi yang disepakati oleh partai sebanyak delapan kursi dan H. Ismail menerimanya.

³³ Wawancara dengan H. Usman (Minggu, 26 Mei 2013) jam 00.00-02.00.

Senada dengan itu bahwa H. Usman juga mengamini pendapat H. Ismail di atas, karena komposisi delapan kursi ini merupakan pembagian kedua orang, yakni H. Ismail dengan H. Usman di dalam Golkar.

Perpindahan partai politik selain terdapat sebab juga terdapat rangkaian langkah-langkah yang dilalui untuk sampai pada partai baru. Adapun langkah-langkah yang dilalui oleh politisi yang pindah partai politik menurut H. Ismail adalah dengan memenuhi persyaratan administratif dalam hal ini dengan membuat surat pengunduran diri kepada partai lama dan mengajukan surat sebagai anggota di partai yang baru.

Hal itu juga sama dengan yang disampaikan oleh H. Khusnul bahwa ia untuk pindah partai politik, maka harus mengajukan surat pengunduran diri pada partai lama dan mengajukan surat sebagai anggota ke partai yang baru. Sebagaimana diungkapkan H. Khusnul:

“saya mas untuk pindah partai ya harus mengajukan surat permohonan pengunduran diri. Setelah itu selesai saya kemudian mendaftarkan diri pada partai baru”.³⁴

Senada dengan keduanya, H. Usman mengatakan bahwa untuk pindah ke partai politik yang lain, diharuskan mengajukan surat pengunduran diri dari partai lama, tetapi yang berbeda dengan data keduanya diatas adalah bahwa H. Usman untuk masuk ke partai Golkar tidak harus mengajukan surat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota, karena masuknya beliau ke partai Golkar disebabkan pinangan pengurus partai golkar kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diungkapkan beliau:

³⁴ Wawancara dengan H. Khusnul (Jum'at, 24 Mei 2013).

“Sebelum saya pindah ke partai politik yang baru terlebih dahulu mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan partai politik PKB, Akan tetapi untuk masuk partai baru saya tidak perlu mendaftarkan diri, karena saya ini kan diminta, bukan meminta untuk menjadi anggota partai Golkar”.³⁵

Berangkat dari ilustrasi diatas terdapat kemiripan dari partai yang ditinggalkan yaitu partai politik PKB, namun partai politik yang baru adalah partai politik Golkar dan PKNU. Antara H. Ismail dan H. Usman sama-sama masuk ke partai politik Golkar sekalipun dengan perlakuan yang berbeda, H Ismail diharuskan untuk mendaftarkan diri secara administrasi untuk menjadi anggota partai Golkar dengan membuat surat pendaftaran, sementara H. Usman tidak menggunakan prosedur administrasi, dengan alasan dipinang oleh partai Golkar. Pada taraf ini, penulis beranggapan bahwa H. Usman dianggap lebih berpengaruh dari H. Ismail. Berbanding lurus dengan H. Ismail, H. Usman juga membuat surat pengunduran diri yang ditujukan ke partai politik PKB dan mengajukan surat pendaftaran sebagai anggota partai politik ke PKNU.

2. Dinamika perpindahan politisi di partai politik

Fenomena perpindahan partai politik belakangan ini sangat banyak terjadi. mendekati pemilu semakin marak fenomena politisi banting stir. Berpindah dari partai politik yang satu ke partai politik lain. Hal demikian itu terjadi karena mengikuti hati nurani ataukah demi sesuap nasi. Kasus seperti inilah yang kemudian mendapat trend istilah politisi kutu loncat.

³⁵ Wawancara dengan H. Usman (minggu, 26 Mei 2013).

Tersirat setidaknya ada beberapa faktor penyebab kenapa para politisi memilih berpindah haluan.

Pertama: Peluang karir. Banyak terjadi di dunia politik Indonesia bahwa orang memilih bergabung dengan partai politik adalah sebagai pekerjaan utama mereka. Ketika partai politik lain dipandang lebih dapat menjamin harta maupun kedudukan, maka si kutu loncat akan mengincar.

Kedua: Insiden politik. Sebab kedua ini juga cukup jamak terjadi. Politisi meloncat ke partai politik lain diakibatkan karena terjadi insiden yang melibatkan dirinya dengan partai lama, sehingga ia mengundurkan diri atau diberhentikan lalu pindah partai politik lain. *Ketiga:* Pragmatisme Politik.

Para Politisi tersebut memandang paradigma politik parpol sebelumnya dengan parpol barunya sama saja, sehingga ia memandang tidak ada masalah ideologis dalam berpindah partai. Pragmatisme politik ini juga tampak telanjang mata terjadi saat pemilu-pemilu daerah. Dimana partai politik yang berseberangan idealismenya bisa duduk bersama mengukung calon kepala daerah mereka. Dari sini menunjukkan bahwa partai politik berazas Islam belum tentu ideologinya Islam. Bagaimana mau disebut partai berideologi Islam jika kerja nyata politiknya melanggar syariah Islam. Demikian pula yang mengaku sebagai Partai nasionalis tetapi ideologinya tidak jelas.

Fenomena Politisi kutu loncat ini memberikan gambaran bagi masyarakat bahwa slogan-slogan politik untuk kepentingan rakyat itu adalah kamufase. Sebab realitanya cenderung untuk kepentingan pribadi. Disaat

yang berbicara adalah tahta dan harta, maka mata hati bisa membuta. Dampaknya kepercayaan masyarakat pada parpol semakin merosot. Berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi baik pemilu nasional maupun daerah.

Fenomena Politisi kutu loncat dikarenakan sang politisi merasa dirinya lebih besar ketimbang partai, atau lebih khusus lagi lebih besar ketimbang para pimpinan partai yang mengucilkannya. Idealnya, seorang politisi menetapkan dulu idealisme perjuangannya seperti apa, dan partai apa yang paling cocok untuk wadah perjuangan. Setelah masuk partai, maka partai lebih besar dari dirinya, artinya ia masuk dalam sistem partai. Ketika sudah di partai maka yang diperjuangkan adalah visi partai, garis politik partai bukan lagi visi pribadi.

Ketika terjadi dinamika politik di internal partai seperti intrik dan segala rupa konflik maka si politisi menyadari sepenuhnya, bahwa ada pembagian kavling level-level dalam perpolitikan. Ada level ideologi dan ada level teknis. Konflik dan intrik politik di internal partai adalah level teknis. Sekalipun ada konflik namun tak membuat si politisi mundur dari partai, kecuali dipecat. Alasannya karena ideologi yang utama. Dan ideologi partai tidaklah berubah. Yang berubah mungkin adalah dinamika partai oleh pengurus dan kadernya saja. Hal ini disebabkan oleh model perseorangan dalam partai politik.

Model perpindahan politisi di kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dari data yang telah diuraikan di atas memiliki kesamaan dalam proses menarik

diri dari partai politik sebelumnya yaitu dengan cara tertib administrasi, dalam artian mengikuti prosedur yang telah ada.

Realitas yang terjadi di kalangan politisi NU di Kabupaten Sidoarjo, dimana politisi yang pindah partai politik memiliki model tersendiri. Model perpindahan partai politik ini diantara politisi yang menjadi subyek dalam penelitian ini mempunyai model yang sama yakni, pindah partai politik mengikuti prosedur yang ada. seperti yang diungkapkan H. Ismail

“Saya mengajukan surat pengunduran diri pada partai politik lama. Setelah itu saya tidak langsung mencari partai politik baru, melainkan berhenti sejenak untuk memilih partai mana yang cocok dengan diri saya dan bisa saya masuki. Pada akhirnya saya diminta oleh pengurus DPD Partai GOLKAR Kabupaten Sidoarjo untuk bergabung. Setelah saya bergabung dengan partai golkar saya juga melengkapi persyaratan administratif yang diberika oleh partai pada saya”.

Berangkat dari keterangan H. Ismail diatas, bahwa perpindahan politisi ke partai politik yang lain melalui cara prosedural yaitu membuat surat pegajuan pengunduran diri pada partai politik lama yaitu PKB. Hal senada juga diungkapkan H. Khusnul yang mengatakan:

“Saya sebelum pindah ke PKNU, saya membuat surat pengunduran diri pada partai lama yaitu PKB”.

Artinya aspek prosedural dalam menarik diri dari partai politik tertentu tidak dapat ditinggalkan, asumsi ini juga diperkuat oleh H. Usman yang mengatakan:

“Sebelum saya pindah ke partai politik yang baru terlebih dahulu mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan partai politik PKB”.

Persamaan proses menarik diri dari partai politik tidak menjadikan pilihan sama untuk menjadi anggota partai politik yang baru, setidaknya ada dua temuan yaitu diminta untuk menjadi anggota oleh pengurus partai yang baru dan ada yang mengajukan surat permohonan menjadi anggota partai yang baru. H. Ismail mengungkapkan bahwa dirinya diminta oleh pengurus DPD Partai GOLKAR Kabupaten Sidoarjo untuk bergabung, sekalipun pada akhirnya harus melengkapi administratif yang diberikan oleh partai. Sebagaimana ungkapan beliau:

“Setelah itu saya tidak langsung mencari partai politik baru, melainkan berhenti sejenak untuk memilih partai mana yang cocok dengan diri saya dan bisa saya masuki. Pada akhirnya saya diminta oleh pengurus DPD Partai GOLKAR Kabupaten Sidoarjo untuk bergabung. Setelah saya bergabung dengan partai golkar saya juga melengkapi persyaratan administratif yang diberikan oleh partai pada saya”.

Senada dengan H. Usman yang juga diminta oleh pengurus DPD Partai GOLKAR Kabupaten Sidoarjo untuk bergabung, sekalipun pada akhirnya harus melengkapi administratif yang diberikan oleh partai, seperti ungkapan beliau:

“untuk masuk partai baru saya tidak perlu mendaftarkan diri, karena saya diminta, bukan meminta untuk menjadi anggota partai Golkar”.

Situasi yang terjadi pada H. Ismail dan H. Usman berbeda dengan yang dialami oleh H. Khusnul. beliau mendaftarkan diri ke PKNU untuk menjadi anggotanya dengan mengisi form-form data diri sebagai persyaratan administrasi, seperti ungkapan beliau:

“saya mendaftarkan diri ke PKNU untuk menjadi anggotanya. Untuk menjadi anggot partai PKNU saya diminta untuk mengisi form-form data diri sebagai persyaratan administrasi”.

Berangkat dari ilustrasi diatas terdapat dua model yang dapat kita tarik benang merahnya terkait dengan perpindahan partai politik ke partai politik yang lain dikalangan politisi NU di Kabupaten sidoarjo yaitu, proses mundur dari partai lama dan masuk ke partai baru.

Subjek penelitian ini memiliki kesamaan dalam proses mundur dari partai lama yaitu dengan cara mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan partai. Sedangkan dalam proses masuk ke partai baru memiliki dua model sekalipun pada akhirnya melengkapi administrasi kepartaian. *Pertama*, dilamar oleh pengurus partai untuk bergabung dalam partainya, sehingga proses administrasi kepartaian dinomorduakan. *Kedua*, mengajukan urat permohonan menjadi anggota partai baru dengan mengisi berbagai form yang telah disiapkan partai.

Model dan motif memiliki katan erat dalam diri para politisi di partai politik. Partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat menuntut kejelian dan berbagai pertimbangan dalam melakukan rekrutmen, begitu juga bagi setiap politisi dalam memilih partai politik sebagai penyambung lidah rakyat membutuhkan alasan dalam menentukan partai politik yang memperjuangkan masyarakat. Berdasarkan deskripsi data lapangan yang telah disajikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menemukan tiga motif politisi pindah partai politik. Motif tersebut yaitu kekecewaan, mengikuti jejak orang tua, dan tidak difungsikan.

a. Kekecewaan sebagai sentralitas perpindahan politisi di partai politik

Politik praktis penuh dengan hasrat berkuasa antara satu dengan lainnya. Untuk mencapai kekuasaan yang dikehendakinya, tidak jarang menghalalkan segala cara, baik dari penghianatan maupun pembunuhan karakter bagi sesama politisi. Tradisi ini sangat kental dalam dunia politik, sehingga politik praktis sering disebut dengan ranah penuh dengan kotoran. Berangkat dari sinilah yang kuat mampu berkuasa dan yang lemah tidak dihiraukan kembali, dan tidak jarang yang menang harus dikalahkan sehingga menimbulkan kekecewaan.

Kekecewaan yang menjadi akut merupakan implikasi dari tidak adanya proses pengakomodiran kader dalam berbagai konflik yang terjadi. Kekecewaan seorang politisi terhadap partai politik yang di diami bisa menjadi salahsatu pemicu politisi pindah partai politik. Perpindahan politisi ke partai politik yang lain merupakan keniscayaan untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Seperti Kekecewaan yang diungkapkan H. Ismail, bermula ketika H. Ismail mencalonkan diri sebagai kandidat ketua Pimpinan Anak cabang (PAC) PKB Kec Porong, dalam hal itu H. Ismail mendapat dua orang pesaing. Dimana para pesaing-pesaing ini merupakan keturunan kyai, dari ketiga kandidat yang ada hanya H. Ismail yang bukan merupakan keturunan kyai. Namun pada puncak perhelatan musyawarah anak cabang hingga dilakukan pemilihan ketua, H. Ismail mampu menandingi dua calon yang sudah ada.

Di dalam pemilihan yang telah berlangsung itu, H. ismail mendapatkan 12 suara. Sedangkan kandidat-kandidat yang lain hanya mendapatkan tiga suara. Oleh karena itu, H. Ismail ditetapkan sebagai pemenang dan berhak untuk menduduki jabatan sebagai ketua PAC Sidoarjo. Sebagai legalitas seseorang bahwa dikatakan sah menjabat sebagai ketua PAC, maka harus mempunyai surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Sidoarjo.

Ironisnya, kemenangan H. Ismail dengan perolehan 12 tidak mendapatkan SK dari DPC, dan bahkan SK yang seharusnya diterima sebagai ketua PAC dianulir oleh para pengurus DPC sehingga mengesahkan dan mengangkat calon kandidat yang mendapatkan tiga suara. Protes yang dilakukanpun hanya sia-sia belaka, karena yang ditunjuk menjadi ketua PAC adalah keturunan kyai, sehingga masyarakat hanya terdiam melihat proses demokrasi yang tidak demokratis ini. Realitas inilah yang menyebabkan kekecewaan bagi H. ismail, sehingga memantapkan diri untuk pindah ke partai lain yaitu Golkar.

Fenomena diatas bila ditinjau dari perspektif fenomenologis ala Alfred Schutz akan mengungkap *because motif* (Sebab) dan *in order to motif* (tujuan) perpindahan dari partai politik yang satu ke partai politik yang lain. Ditinjau dari perspektif *because motif* realitas diatas telah menunjukkan bahwa perpindahan politik disebabkan oleh adanya kekecewaan terhadap sistem yang berjalan di partai sebelumnya.

Misalnya demokrasi yang tidak demokratis, dengan artian dengan pondasi demokrasi masih menggunakan penunjukkan langsung untuk menjadi ketua yang didasarkan pada kelas sosial yang ada.

Sedangkan dalam kacamata *in order to motif* perpindahan politik ke partai golkar adalah untuk membantu banyak orang dan lebih bermanfaat bagi organisasi dan dirinya disatu sisi. disisi lain, untuk menunjukkan eksistensi dirinya dan menjunjung tinggi sistem demokrasi kepartaian.

b. Taqdim pada orang tua sebagai manifestasi patron-klien

Politik praktis mempunyai ruang dimensi yang beragam, berbagai alasan dan pijakan dasar juga bermunculan. Bagi Khusnul, keterlibatan dirinya dan keluarga besarnya dalam politik praktis, adalah panggilan agama, sehingga apapun keputusan yang diambil orang tua dalam berpolitik juga menjadi pilihan politik bagi keluarga termasuk khusnul. Pada taraf ini menegaskan bahwa pilihan berpolitik praktis dan pilihan berpartai tidak akan lepas dari landasan teologis. Penegasan bahwa dengan niatan untuk menegakkan ajaran-ajaran Allah (*lillahita'ala*) adalah salah satu bukti akan kuatnya alasan normatif teologis ini.

Realitas diatas semakin dikuatkan oleh banyaknya pelibatan jargon-jargon agama dalam ruang politik nasional. Seperti pengharaman presiden perempuan yang marak dilakukan oleh para kyai sebagai respon negatif bagi pencalonan Megawati Sukarno Putri sebagai presiden, berikut juga penggemosan pencalonan Khofifah Indarparawansa dalam

pencalonan gubernur Jawa Timur. Alasan normatif teologis ini merupakan sebuah pilihan yang wajib dilaksanakan karena sebuah keharusan untuk menyelaraskan tatanan politik dengan norma agama.

Ridho Allah adalah ridho orang tua, jika orang tua marah maka Allah akan marah, tapi jika orang tua merestui maka Allah pasti akan merestui. Oleh karena itu, orang tua dipandang sebagai tokoh sentral jelmaan Allah dalam kehidupannya, termasuk dalam dunia politik. Dengan demikian, sikap politik seperti ini sangat kental dengan sikap patron klien.

Asumsi diatas disebut oleh Jackson sebagai otoritas.³⁶ Otoritas ini adalah otoritas patron yang mempengaruhi dan membangkitkan emosi para pengikutnya. Mereka akan mempertahankan patronnya sekuat tenaga. Pola hubungan seperti ini sangat mengakar di kalangan penduduk desa di Indonesia, dan sering dimanfaatkan untuk melayani kepentingan-kepentingan politik, karena masyarakat dapat dengan mudah dimobilisasi

³⁶ Penelitian Jackson secara panjang lebar diulas oleh Asfar. Lihat Muhammad Asfar, "Pergeseran Otoritas Kepemimpinan Politik Kiai", *Prisma*, 5 Mei (1995), 36. Dalam penelitiannya, Jackson banyak menggunakan teori kepemimpinan, yang salah satunya adalah teori otoritas. Teori otoritas yang cukup populer dikemukakan oleh Max Weber. Dalam melakukan pemilahan kepemimpinan. Weber membagi otoritas menjadi tiga, yaitu otoritas kharismatik, otoritas tradisional dan otoritas rasional. *Otoritas kharismatik* didasarkan pada kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang. Kemampuan ini melekat pada diri seorang pemimpin yang dipercaya berasal dari anugerah Tuhan. Masyarakat mengakui adanya kemampuan itu berdasarkan kepercayaan, karena kemampuan seorang pemimpin di atas ukuran manusia normal. *Otoritas tradisional* dimiliki seorang pemimpin bukan karena kemampuan khusus, tetapi karena pengakuan masyarakat secara tradisi dan lembaga. Cirinya, otoritas seorang pemimpin terikat dengan masyarakat dan ketentuan tradisi yang berlaku. Weber membagi otoritas tradisional menjadi dua; patriarkhalisme dan patrimonialisme. Yang pertama kekuasaan pemimpin didasarkan pada senioritas; sementara yang terakhir didasarkan pada kerja sama dengan kerabat atau orang-orang terdekat yang memiliki loyalitas terhadap pemimpin. Sementara *otoritas rasional* didasarkan pada sistem hukum yang berlaku di masyarakat, yang ditaati dan diperkuat oleh birokrasi pemerintah. Seringkali yang terjadi, untuk sekedar menenteramkan masyarakat, sistem ini disesuaikan dengan tradisi, agama dan budaya setempat. Max Weber, *The Theory of Social and Economics* (Glencoe: The Free Press, 1957), 56.

hanya dengan memobilisasi lapisan *patron* yang lebih tinggi. Afiliasi politik *patron* biasanya diikuti oleh kliennya. Selain itu, perubahan apapun dalam sikap politik yang dibuat oleh *patron* akan menyebabkan perubahan serupa dalam sikap politik para pengikutnya. Dengan pola seperti ini, pengikut yang setia akan memenuhi permintaan dukungan apapun dari kyai mereka, bahkan jika dukungan ini diperuntukkan bagi partai pemerintah. Sebagian pengikut akan melakukan hal ini tanpa berfikir panjang, karena mereka yakin bahwa kyai mengetahui apa yang tidak dapat diketahui oleh orang biasa.³⁷

Pola kepemimpinan yang bercorak otoritas tradisional sudah mulai bergeser. Para santri tidak selamanya tunduk pada kyai. Pada persoalan tertentu seperti menentukan hukumnya bunga bank, tempat shalat di hari raya, dan bahkan masalah pilihan politik terdapat perbedaan antara kyai dan santri, sementara untuk hal tertentu ada kesamaan pandang.³⁸ Namun, seiring berjalannya reformasi, sejumlah kalangan mulai meyakini ada penurunan kadar ketaatan, terutama jika dikaitkan dengan hubungan antara preferensi politik santri, masyarakat, dan kyai.

Terdapat banyak faktor yang dinilai menjadi penyebab. Menurut Asfar, setidaknya terdapat dua faktor penyebab; *Pertama*, semakin beragamnya partai dan tokoh yang dapat dipilih masyarakat dalam pemilu. Hal itu tidak saja mengubah perilaku dan preferensi memilih, tidak hanya masyarakat, tetapi juga para kyai. Faktor *kedua*, semakin

³⁷ Pradjarta, *Memelihara Umat*, 123.

³⁸ Asfar, Muhammad, "Pergeseran Otoritas Kepemimpinan Politik Kyai..", 36.

menipisnya ”ketaatan” politis umat. Menurut Priyatmoko, hal itu disebabkan kian banyak warga yang berpengetahuan dan berpengalaman tentang bagaimana memilih dan siapa atau apa yang harus mereka pilih. Dengan modal pengetahuan itu, masyarakat calon pemilih, baik dalam pilkada langsung maupun pemilu, lebih paham soal bagaimana perilaku dan kecenderungan memilih dan manfaatnya bagi mereka. ”Sekarang ini (santri) yang generasi muda kian kritis. Saat mendengar fatwa atau tausiyah, mereka tak langsung mengiyakan. Mereka juga mulai bisa berpikir, dalam kasus ini kyai dapat (keuntungan) berapa?”³⁹

Relasi patron klien ini nampak dari perilaku politik yang dilakukan oleh H. Khusnul Huda. Bahwa ia terjun di dalam partai politik mengikuti dimana orang tuanya ada dalam partai politik tertentu. Hal ini dipilih H. Khusnul karena dengan mengikuti jejak politik orang tua merupakan bagian dari taqdim. Hal ini juga berlaku ketika orang tua berpindah partai politik berpindah partai politik, sang anak pun juga mengikuti kemana langkah orang tua tersebut.

Fenomena diatas bila ditinjau dari perspektif fenomenologis ala Alfred Schutz akan mengungkap *because motif* (Sebab) dan *in order to motif* (tujuan) perpindahan dari partai politik yang satu ke partai politik yang lain. ditinjau dari perspektif *because motif* realitas diatas telah menunjukkan bahwa perpindahan politik disebabkan oleh karena orang tua juga melakukan perpindahan partai politik. Mengikuti jejak langkah

³⁹ Wisnu Dewabrata, ”Politik Pesantren; Makna Yang Didengar dan Ditaati”, *Kompas*, 15 Juli 2008.

orang tua jika ditilik lebih lanjut melalui motif sebab sehingga menghasilkan keputusan yang telah dipilih oleh H. Khusnul. Karena orang tua ada di partai politik lain maka beliau juga ikut, tanpa membuat pertimbangan-pertimbangan sebagai konsekuensi dari pilihannya.

Sedangkan dalam kacamata *in order to motif* perpindahan politik ke Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) adalah memberikan gambaran kepada kita bahwa jika H. Khusnul mengikuti pilihan politik orang tua dimungkinkan mendapatkan posisi strategis didalam partai politik dan sebagai sikap taqdim pada orang tua.

c. Abnormalisasi struktural partai politik

Karir politik yang dilakukan secara bertahap mulai dari kaderisasi, pengurus banom sampai pengurus partai politik. Partai politik sebagai sarana pengemban aspirasi masyarakat, sehingga dengan jabatan di partai politik, para politisi bisa membantu kebutuhan masyarakat. Jabatan di partai politik merupakan hal yang penting untuk seseorang yang telah lama berkarier di partai politik. berbagai tugas kemasyarakatan dilakukan secara kolektif berdasarkan tugas dan fungsinya di setiap jabatan.

Secara normal, setiap politisi mengemban amanah masyarakat dalam partai politik. Namun tidak bisa dipungkiri jika partai politik juga wadah dari berbagai kepentingan para politisi. Berbagai dialektika kepentingan inilah yang memecah antara satu dengan lainnya sehingga sebagian dari jabatan tidak berfungsi secara maksimal dan bahkan sebagian orang tidak difungsikan dalam mengemban amanah masyarakat.

Seperti yang terjadi pada subyek dalam penelitian ini, ketika ia tidak lagi difungsikan dalam partai politik akhirnya ia memilih sikap tegas untuk pindah ke partai politik lain.

Fenomena diatas bila ditinjau dari perspektif fenomenologis ala Alfred Schutz akan mengungkap *because motif* (Sebab) dan *in order to motif* (tujuan) perpindahan dari partai politik yang satu ke partai politik yang lain. ditinjau dari perspektif *because motif* realitas diatas telah menunjukkan bahwa perpindahan politik dikarenakan dua sebab yaitu; *Pertama*, karena pada periode-periode sebelumnya ia menduduki posisi puncak DPC PKB Kabupaten Sidoarjo, namun pada periode selanjutnya ia tidak difungsikan sama sekali. Hingga akhirnya ia memilih untuk berpindah partai politik.

Kedua, sebagai mantan akademisi yang berlatar belakang aktifis membuat H. usman yang merasa partai politik tidak mampu mewedahi pikiran-pikiran yang menghendaki perbaikan bagi daerah. Oleh karena itu tiada pilihan lain kecuali pindah ke partai politik yang sejalan dengan pola pikir yang ia miliki.

Sedangkan dalam kacamata *in order to motif* perpindahan politik ke partai GOLKAR adalah untuk menjaga eksistensinya di dunia politik, agar tetap dapat bertahan pada konstelasi politik pada periode-periode selanjutnya.

3. Prilaku Rasional Memilih Partai Politik

Di dalam melihat kecenderungan seseorang menjatuhkan pilihan ke partai politik x atau lebih cenderung memilih pada partai politik y atau bahkan menjatuhkan sikap politik yang tidak berpihak pada partai politik manapun.

Pendekatan pilihan rasional mengasumsikan pemilih mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik yang diajukan. Kelompok masyarakat yang dapat menjadi pemilih rasional umumnya tidak begitu mempertimbangkan faktor kesamaan dalam lingkungan sosialnya, maupun ikatan emosional dengan partai tertentu.⁴⁰

Keaktifan dalam partai politik dilandasi oleh semangat yang berkobar dalam diri kita pribadi, semangat ini merupakan titik pijak keterpanggilan nurani untuk aktif dalam mewujudkan kesejahteraan bagi orang banyak. Partai politik dapat menjadi satu wadah yang dapat mewujudkan untuk membantu orang.

Di lain pihak, H. Usman memberikan pandangan berbeda dengan H. Ismail, pandangan H. Usman terkait pilihannya untuk aktif di partai politik didasarkan pada pengalaman organisasi sebagai dasar pilihan politiknya. Kebiasaan berorganisasi berkelindan dengan persoalan yang ada di partai politik sehingga melanjutkan pengalaman organisasi di panggung politik menjadi keharusan dalam menunjukkan eksistensi diri sebagai politisi, sebagaimana diutarakan:

⁴⁰ Muhammad Asfar, *Beberapa Pendekatan Dalam Memahami Perilaku Pemilih*, dalam *Jurnal Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 16.

“Bagi saya dunia politik itu kan sesuatu yang penuh dengan ketidakjelasan. Artinya apa yang sudah kita rencanakan dengan matang belum tentu bisa terwujud, Karena menyangkut banyak orang di dalam partai itu mas. Dan kelebihan ketika saya ada di dalam partai politik pikiran-pikiran kita selalu dikondisikan untuk selalu cerdas didalam menagkap realitas sosial-politik. Sederhananya ya kita selalu mengatur strategi gitu mas.”⁴¹

Anggapan partai politik yang penuh dengan ketidakjelasan atau abu-abu membutuhkan pikiran-pikiran cerdas dan penuh pengalaman sehingga orang yang aktif dalam organisasi sudah selayaknya melanjutkan karir politiknya di partai politik. Hal dilakukan untuk menjaga perilaku politik ideal.

⁴¹ Wawancara dengan H. Usman (Minggu, 26 Mei 2013) jam 00.00-02.00.